

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pasca kemerdekaan Indonesia, usaha dalam mengambil alih pemerintahan militer secara jelas tertuang dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 yang mengumumkan terbentuknya “Badan Penolong Keluarga Kurban Perang”. Secara keorganisasian, “Badan Penolong Keluarga Kurban Perang” mencakup BKR (Badan Keamanan Rakyat).¹ Menjadi sebuah langkah awal berdirinya instansi tersendiri perihal keamanan negara dalam sebuah keputusan resmi. Badan Keamanan Rakyat menjadi awal lahirnya dari kedaulatan dalam pengaturan tentara oleh negara. Badan Keamanan Rakyat menjadi awal lahirnya TNI (Tentara Nasional Indonesia) di kemudian hari.

Pembentukan komposisi dalam tubuh TNI tidak luput dari peran kemiliteran pra kemerdekaan. Penyatuan tiga instansi dalam satu tubuh menuai pro dan kontra dalam perjalanannya. Bekas tentara PETA merasa memiliki dalam hal jumlah prajurit yang terdiri dari berbagai badan militer buatan Jepang dan perwira KNIL yang mendapatkan pendidikan secara profesional serta para Laskar yang merupakan pertahanan rakyat pada tataran bawah. Perbedaan sudut pandang dan pengalaman dalam penyatuan sebagai satu instansi tersebut diambil kesimpulan bahwa itu merupakan bentuk rasa cinta mereka terhadap tanah air.

¹ Ulf Sundhaussen. “Politik Militer Indonesia 1945 – 1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI” Jakarta: LP3ES, hlm 11, 1986.

Dengan kata lain, konsep tentara sekarang itu perkawinan antara konsep tentara Jepang, Belanda, Amerika, plus pengalamannya²

Pada tahun 1948, Hatta yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia mengajukan usul untuk mengadakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) serta membangun kembali angkatan bersenjata dan seluruh aparat negara. Sundhaussen menjelaskan maksud dari usulan kebijakan Hatta tersebut.

Tujuan dasar kebijakan tersebut adalah untuk menciutkan jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensinya, dan menempatkannya kembali di bawah pimpinan pemerintah. Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting, karena kesatuan kesatuan tempur saat itu mulai menguasai daerah-daerah kantong atau daerah-daerah front mereka secara mandiri dengan menempuh kebijaksanaan mereka masing-masing.³

Kebijakan Re-Ra ini berdampak dalam pendidikan perwira militer angkatan darat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Akademi Tjandradimuka berubah menjadi Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD). Pembubaran Akademi Tjandradimuka sendiri dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution, dengan pertimbangan dalam hal independensi dalam pendidikan tentara serta pengambil alihan kekuasaan sekolah pendidikan perwira menanggapi kebijakan Re-Ra yang mengecilkan peran KSAD dalam tubuh tentara.

² Benedict Anderson. “*Membangun Republik*”, Yogyakarta : GalangPress, hlm 64, 2017

³ Ulf Sundhaussen. 1986. “*Politik Militer Indonesia 1945 – 1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI*” Jakarta: LP3ES, hlm 63-64

Berdasarkan Surat keputusan Kasad Nomor : 95/KAD/KPTS/51 tanggal 25 Mei 1951, fungsi SSKAD merupakan lembaga pendidikan TNI AD yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan bagi perwira – perwira Angkatan Darat yang diarahkan untuk menjabat Kepala Staf, Komandan Batalyon, Komandan Resimen, Perwira Staf Tentara dan Teritorium atau Staf Umum Angkatan Darat. Pendidikan SSKAD bertujuan untuk melatih pengetahuan dasar kemiliteran modern secara teoritik dan praktik.⁴

Latar belakang historis sangat menentukan dalam memahami perkembangan peranan sosial politik militer Indonesia, khusus dengan melihat sejauh mana pengaruhnya dalam proses profesionalisasi, sikap korporasi, pelebagaan politik dan adanya suatu Ideologi Nasional. Proses profesionalisasi merupakan usaha yang sulit karena harus mengubah suatu “tentara revolusi” yang bersifat populis dan egalitarian menjadi suatu tentara yang profesional dan lebih terampil.

Bagi tentara pada masa revolusi kenggotaan dalam TNI merupakan panggilan pengabdian untuk memperjuangkan dan membela kemerdekaan negara dan bangsa. Tapi pada masa pasca-revolusi, jumlah tentara yang banyak harus dikurangi dan promosi jabatan tidak lagi ditentukan oleh semangat perjuangan semata, tapi juga sudah ditambah oleh perlunya keterampilan profesional.⁵

⁴ Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, “*Sejarah Seskoad*”, Bandung, 2010, hal 5

⁵ Amos Perlmutter, “*Militer Dan Politik*”, Rajawali Pers, 1984, Jakarta

Huntington menjelaskan bahwa profesionalisme militer memiliki tiga ciri pokok bagaimana tumbuhnya profesionalisme militer.⁶ Ciri yang utama adalah keahlian, sehingga profesi militer kian menjadi spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Keahlian yang kian spesifik ini diperoleh melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman.

Ciri kedua dari militer profesional adalah tanggung jawab sosial yang khusus. Disamping memiliki nilai – nilai moral yang tinggi yang harus terpisah sama sekali dari insentif ekonomi, seorang perwira militer mempunyai tanggung jawab pokok kepada Negara. Ini berbeda dengan seorang prajurit biasa yang seakan – akan “milik pribadi” komandan dan harus setia kepadanya, yang lazim dikenal sebagai bentuk “disiplin mati”. Seorang perwira profesional berhak mengoreksi komandan nya, jika komandandan melakukan hal – hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Ciri ketiga adalah karakter korporasi dari para perwira yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat. Korps perwira militer merupakan suatu “birokrasi profesional” karena anggota – anggotanya mengabdikan pada birokrasi Negara.

Pendidikan profesionalisme dalam tubuh TNI menjadi pegangan kuat dalam pembangunan militer di Indonesia oleh Abdul Haris Nasution. SESKOAD menjadi salah satu corong pendidikan perwira militer Angkatan Darat dalam tubuh TNI. Perhatian terhadap pendidikan profesionalisme tentara Indonesia

⁶ Samuel P Huntington, *Prajurit dan Negara “Teori dan Politik Hubungan Militer dan Sipil”*, Gramedia, Jakarta

menjadi awal bentuk tentara profesional Indonesia pasca penjajahan oleh Belanda dan Jepang.

Seminar Angkatan Darat juga menghasilkan konsep – konsep prosedur tentang langkah – langkah yang harus diambil pemerintah guna membangun stabilitas di bidang politik ekonomi.⁷ Hal tersebut membuktikan peranannya bukan hanya dalam ranah pertahanan akan tetapi lebih luas dalam aspek kenegaraannya.

Di bawah kekuasaan Soeharto militer ABRI/TNI masif memainkan peran signifikan terhadap hampir di seluruh kehidupan politik bernegara, dengan dwifungsi tersebut TNI membangun kekuatan politiknya dalam sekretariat bersama “Golongan Karya/Golkar” dengan kaum teknokrat dan profesional, dimana kelak penguasaan dan pengaruh politiknya tidak sebatas pada unit – unit politis melainkan meluas pada pemaknaan penguasaan sektor – sektor ekonomi, sosial dan budaya. Disini militer memiliki peran ganda, seperti yang diungkapkan Huntington, dalam karakter *praetorian*⁸ sekaligus sebagai profesional terhadap perubahan – perubahan politik yang menyertainya.⁹

Sebagai salah satu lembaga pendidikan dalam instansi militer di Indonesia, kurikulum atau program pendidikan menjadi salah satu faktor dari pandangan orientasi militer membuat lembaga pendidikan militer SESKOAD diteliti sebagai

⁷ Koran Angkatan Bersendjata tanggal 9 September 1966

⁸ intervensi militer ke dalam politik demokratis yang mengalahkan dominasi sipil.

⁹ Huntington dalam buku Syamsul Maarif, “*Militer Dalam Parlemen 1960-2004*”, Jakarta; Prenada, hlm 24, 2011

tambahan referensi dalam pelajaran sejarah di sekolah khususnya kajian sejarah militer Indonesia pada saat membahas materi Orde Lama sampai Orde Baru.

Pembagian Periode dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahun penting, yaitu 1951 sebagai lahirnya SSKAD yang menjadi awal lahirnya SESKOAD lalu tahun 1966 sebagai lahirnya Orde Baru yang menjadi titik dimana dwi fungsi TNI di praktikan lewat Seminar Angkatan Darat ke - dua dan tahun 1974 sebagai batas akhir penggunaan kurikulum SESKOAD yang berubah menggunakan kurikulum SESKO ABRI di tahun selanjutnya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Fokus pembahasan tentang Sejarah Pendidikan Perwira Militer Angkatan Darat (SESKOAD) dan Peranannya Dalam Pemerintahan Orde Baru, maka pembatasan masalah dalam tulisan ini adalah lahirnya pendidikan perwira militer serta penerapan kurikulum yang dipilih dalam pelaksanaan pendidikan perwira Angkatan Darat dan pembentukan Dwi Fungsi ABRI sebagai fondasi dari pemerintahan Soeharto. Dipilihnya tahun 1951 sampai dengan 1974 oleh peneliti dikarenakan awal terbentuknya SESKOAD yang sebelumnya memiliki istilah SSKAD serta perubahan kurikulum dalam menghadapi dinamika zaman pada masa itu dan peranannya dalam pemerintahan Orde Baru.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup bidang politik dan ekonomi pada rentang waktu 1951-1974 ketika SESKOAD resmi dibentuk pada 17 November 1951 di Bandung dan peran perwira SESKOAD pada masa pemerintahan Orde Baru:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat?
2. Bagaimana penerapan kurikulum Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada periode 1951 - 1974?
3. Bagaimana peranan SESKOAD pada masa 1965 - 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana sejarah pembentukan SESKOAD serta untuk mengetahui bagaimana SESKOAD menjalankan perannya dalam pemerintahan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan :

- Kegunaan Teoretis : Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah referensi kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya sejarah pendidikan militer dan peranannya dalam pemerintahan Indonesia pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru.

- Kegunaan Praktis : Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk pengayaan dalam pembelajaran dan perkuliahan baik di tingkat SMA, maupun di Program Studi Pendidikan Sejarah UNJ, khususnya kajian sejarah militer Indonesia pada masa transisi Orde Lama dengan Orde Baru

D. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian yang membahas pendidikan perwira militer Angkatan Darat SESKOAD bersifat studi kepustakaan atau *secondary research*. Data pendukung penelitian ini berasal dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

Penulisan skripsi ini menggunakan 4 tahap dalam penulisan yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Metode tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰

1. Heuristik

Peneliti dalam proses heuristik mendapatkan sumber buku di beberapa tempat diantaranya Ruang Baca Sejarah, Perpustakaan UNJ, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Jakarta, Perpustakaan Daerah Depok dan Perpustakaan Museum Satria Mandala. Pencarian sumber berupa Arsip atau Koran, peneliti mendapatkan sumber di Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional.

¹⁰ Louis Gottschalk, terjemahan Nugroho Notokusanto, "*Mengerti Sejarah*", (Jakarta: UI Press, 1985), hlm 43

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari tangan pertama, atau langsung dibuat (waktu sama) dengan peristiwa yang dikaji¹¹. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini seperti Jurnal Karya Virajati, Surat Kabar Berita Antara, Surat Kabar Merdeka, Surat Kabar Angkatan Bersendjata dan Arsip-arsip negara yang berhubungan dengan tema penelitian dalam kurun waktu 1951-1974

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berasal bukan dari pelaku atau saksi atau kata lain pengkisah hanya tau peristiwa dari pelaku atau saksi. Sumber sekunder berupa buku yang mengenai pendidikan perwira militer dan kondisi militer Indonesia karya-karya Ulf Sundhaussen : Politik Militer Indonesia 1945 – 1967 menuju Dwi Fungsi ABRI, Petrik Matanasi : Sejarah Tentara, Syamsul Maarif : Militer Dalam Parlemen 1960-2004, Benedict Anderson : Revoloesi Pemoeda, Rosihan Anwar : Sukarno, Tentara dan PKI ; Segitiga kekuasaan sebelum prahara politik 1961 – 1965.

2. Kritik Sumber

Setelah melalui tahap Heuristik, langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Di dalam penulisan sejarah, tahapan kritik sumber bertujuan

¹¹ *Ibid*, hlm 44

untuk mengetahui kredibilitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Dalam kritik ekstern, dilakukan uji atas keaslian atau otentisitas sumber yang meliputi tanggal, pengarang, melihat bahan material seperti tulisan atau ketikan, stempel, dan tanda tangan, jenis kertas dan tinta yang digunakan. Sedangkan untuk kritik intern penulis melakukan uji analisis terhadap kredibilitas teks dan terbitan. Peneliti membagi sumber menjadi dua kelompok secara penerbit dan latar belakang penulis. Mengingat bahasan mengenai militer, penulis dari militer dikelompokkan berbeda dengan penulis dari sipil. Penerbitan juga dilihat dari penerbit mana buku tersebut diterbitkan.

3. Interpretasi

Tahap ketiga adalah interpretasi atau menafsirkan fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan sejarah berdiri dan berkembangnya Pendidikan perwira militer SESKOAD dan peranannya dalam pemerintahan Orde Baru.

4. Historiografi

Hal yang dilakukan adalah menyusun fakta-fakta sejarah menjadi suatu karya sejarah. Setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, dan menafsirkan yang kemudian dinarasikan kembali menjadi suatu peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan.